



Perspektif Pertahanan Negara dalam Pemekaran Wilayah: Studi Kasus Madura

National Defense Perspective in Regional Expansion: A Case Study of Madura

Achmad Farid Wadji¹

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia

Levianto Jubei²

Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Indonesia

Mohammad Hidayatul Holili³

Universitas Stekom, Semarang, Indonesia

Trichya Agustinus⁴

Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia

Artikel Masuk : 27 Maret 2023

Artikel Diterima : 26 April 2023

Tersedia Online : 31 Desember 2023

Abstrak: Pemekaran provinsi di Indonesia memiliki konsekuensi positif dan negatif terhadap pembangunan daerah dan nasional, termasuk aspek pertahanan negara. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pertahanan negara dalam pengusulan provinsi baru di Indonesia dengan fokus pada pengusulan Madura sebagai pemekaran provinsi di Jawa Timur. Pertanyaan studi ini adalah Bagaimana perspektif pertahanan keamanan terhadap pengusulan pemekaran provinsi? Dalam studi kasus pengusulan Madura sebagai provinsi baru, apa saja dampaknya terhadap pertahanan keamanan? Metode studi ini adalah campuran – melakukan analisis data statistik provinsi Jawa Timur dan hasilnya dikonfirmasi kepada 16 narasumber. Temuan studi menunjukkan bahwa Jawa Timur layak dimekarkan; dan pemekaran wilayah Madura dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah, namun perlu memperhatikan biaya yang harus dipenuhi dan konflik kepentingan. Temuan lainnya adalah implikasi peningkatan belanja operasional territorial pertahanan keamanan, pemekaran wilayah dapat mendukung pertahanan keamanan wilayah yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perspektif pertahanan negara dalam pengusulan provinsi baru di Indonesia dengan studi kasus Madura. Penelitian berikutnya dapat

¹ Korespondensi Penulis: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia
Email: zahramdr@gmail.com

fokus pada analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pertahanan keamanan serta penanganan konflik kepentingan yang dapat timbul.

Kata Kunci: konflik kepentingan, Madura, pemekaran provinsi, penguatan pertahanan keamanan, perspektif pertahanan negara

Abstract: *The province expansion in Indonesia has both positive and negative consequences for regional and national development, including national defense aspects. This study aims to analyze the national defense perspective in proposing new provinces in Indonesia, with a focus on Madura's proposal as a new province in East Java. The research question is: How does the national defense perspective affect the proposal of province expansion? In the case of Madura's proposal as a new province, what are its impacts on national defense? This mixed-method study analyzed statistical data of East Java and confirmed its results with 16 informants. The findings suggest that East Java is suitable for province expansion and that Madura's province expansion can accelerate the development and growth of the region, but it needs to consider the costs and conflicting interests. Another finding is that province expansion can reduce social conflicts and accelerate the rehabilitation process as efforts to maintain sustainable national defense. This study provides a clearer picture of the national defense perspective in proposing new provinces in Indonesia with the Madura case study. Future research could focus on analyzing the impacts of province expansion on national defense and addressing conflicting interests that may arise.*

Keywords: *conflicting interests, Madura, national defense perspective, national defense strengthening, province division*

Pendahuluan

Pemekaran provinsi di Indonesia memiliki konsekuensi positif dan negatif terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dalam konteks risiko pemekaran wilayah terhadap aspek pertahanan negara, sedikit tulisan yang memberikan tinjauannya. Makalah ini memberikan tinjauan spesifik pemekaran wilayah di Indonesia dalam perspektif pertahanan negara dengan mendalami pengusulan Madura sebagai pemekaran provinsi di Jawa Timur.

Indonesia memiliki beberapa provinsi yang memiliki jumlah penduduk sangat besar atau wilayah yang luas. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, terkadang wilayah provinsi yang ada menjadi terlalu sulit untuk dikelola efektif. Oleh karena itu, pemekaran provinsi menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah dalam mengelola wilayah dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan dimekarkannya provinsi, maka pemerintah pusat dapat lebih mudah mengawasi dan mengelola keseluruhan wilayah dalam konteks peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Selain itu, dengan dimekarkannya provinsi, pemerintah juga dapat mempercepat pembangunan di daerah tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.

Namun, pemekaran provinsi juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah biaya yang diperlukan untuk membentuk pemerintah daerah yang baru, termasuk untuk membangun gedung kantor pemerintah, membeli aset baru, membayar gaji dan tunjangan bagi pegawai baru, dan lain-lain. Biaya tersebut dapat sangat besar tergantung pada ukuran wilayah yang dimekarkan dan jumlah penduduknya. Selain itu, pemekaran provinsi juga dapat menimbulkan konflik antar masyarakat dan juga memperumit tata kelola pemerintahan karena ada potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah yang lama dan yang baru. Oleh karena itu, pemekaran provinsi harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi, dan faktor budaya dan sosial.

Pengusulan Madura menjadi provinsi baru di Indonesia telah menjadi topik pembicaraan di kalangan akademisi dan pemerintah selama beberapa tahun terakhir.

Beberapa pihak menyatakan bahwa Madura memiliki identitas budaya dan ekonomi yang berbeda dengan wilayah lain di Jawa Timur, sehingga pemekaran wilayah menjadi opsi yang mungkin. Namun, pemekaran wilayah dapat memicu risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di Jawa Timur maupun di tingkat nasional. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam pengusulan Madura menjadi provinsi baru. Secara spesifik, pengusulan pemekaran wilayah juga perlu mempertimbangkan perspektif pertahanan negara. Pemekaran wilayah dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas nasional, terutama jika wilayah yang baru terbentuk memiliki potensi konflik dengan wilayah lain di Indonesia.

Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah adalah pembagian wilayah administrasi menjadi dua atau lebih daerah otonom baru, yang dapat mempercepat pembangunan (Saputra, 2021). Pemekaran daerah di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah hasil perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa permasalahan dalam proses pemekaran wilayah di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah antara lain perbedaan agama, suku dan budaya, ketimpangan pembangunan ekonomi, dan luas wilayah. Pemekaran daerah menjadi hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan harapan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat setempat serta memperkuat interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah yang baru.

Pembentukan provinsi baru di Indonesia dapat memberikan beberapa manfaat (Alamsyah & Subekti, 2017; Booth, 2011; Kadaryanto, 2018), antara lain: meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, mempercepat penyelesaian konflik, dan meningkatkan representasi politik. Dengan memekarkan wilayah yang terlalu luas menjadi beberapa provinsi, pemerintah dapat lebih fokus dan efektif dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di setiap wilayah. Dalam provinsi yang lebih kecil, pemerintah dapat lebih mudah mengelola dan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui pemekaran wilayah, pemerintah dapat lebih fokus pada pembangunan wilayah yang lebih kecil dan pengentasan kemiskinan sehingga dapat lebih cepat dan efektif dalam meningkatkan produktivitas dan perekonomian di daerah tersebut (Elia, Yulianto, Tiawon, Sustiyah, & Indrajaya, 2020). Hal ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat setempat, seperti peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Pemekaran wilayah juga dapat memecahkan masalah konflik yang terjadi di wilayah yang terlalu luas. Dengan memisahkan wilayah yang berbeda dengan karakteristik dan kepentingan yang berbeda, pemerintah dapat mengurangi potensi konflik antar wilayah (Deiwiks, Cederman, & Gleditsch, 2012). Sementara itu, pembentukan provinsi baru diyakini dapat meningkatkan representasi politik masyarakat di wilayah tersebut, karena masing-masing provinsi memiliki perwakilan di parlemen dan pemerintah daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat setempat. Beberapa penelitian lainnya, seperti Fitriani (2005) menemukan bahwa terdapat insentif politik, fiskal dan ekonomi untuk menciptakan yurisdiksi baru. Sebaliknya, Duncan (2007) menemukan bahwa desentralisasi dapat menimbulkan ancaman baru bagi etnis minoritas.

Dengan demikian, dampak pemekaran provinsi dapat berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pemerataan pembangunan, sumber daya alam, dan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat setempat. Sebagai contoh, beberapa studi tentang pemekaran provinsi Banten menunjukkan adanya dampak positif dalam pembangunan wilayah tersebut, seperti temuan Saputra (2021) menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Banten pada tahun 2000 meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Selain itu, pemekaran Provinsi Banten juga

dikaitkan dengan peningkatan partisipasi politik dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat setempat (Septianingrum et al., 2020).

Sebaliknya, tidak sedikit riset yang menunjukkan bahwa pembentukan provinsi baru di Indonesia dapat memiliki implikasi sosial yang kompleks (Kadaryanto, 2018), tergantung pada konteks dan karakteristik masyarakat di wilayah yang terkena dampak. Beberapa implikasi sosial yang mungkin terjadi antara lain: Perubahan Identitas, Pengaruh Budaya, Ketimpangan Sosial-Ekonomi, dan Konflik Antarwilayah. Pembentukan provinsi baru dapat mengubah identitas masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi perasaan mereka terhadap negara, identitas kebangsaan, dan persatuan nasional. Pembentukan provinsi baru dapat mempengaruhi pengaruh budaya dari masyarakat lain di Indonesia. Hal ini dapat memicu perdebatan atau konflik tentang keberagaman budaya dan identitas lokal. Pembentukan provinsi baru dapat memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi antara wilayah yang baru terbentuk dan wilayah tetangga yang lebih maju. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan protes dari masyarakat setempat. Pembentukan provinsi baru dapat memicu konflik antar wilayah, terutama jika ada persaingan sumber daya atau identitas lokal yang saling bertentangan. Makalah-makalah ini menunjukkan bahwa pemekaran provinsi Banten tidak berdampak positif terhadap kualitas hidup penduduknya. Septianingrum (2020) menemukan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi dengan *Williamson Index* (WI) 0,95 pada tahun 2011 dan menurun pada tahun 2015 dengan WI 0,77, menunjukkan bahwa kualitas hidup penduduk belum membaik sejak provinsi dibentuk. Najmuddin (2020) menemukan bahwa semua jenis belanja modal berdampak positif, namun hanya belanja untuk jalan, irigasi, jaringan; dan bangunan yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pembentukan provinsi memiliki beberapa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak tersebut belum cukup untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Peneliti lainnya juga menunjukkan ada implikasi ekonomi positif dan negatif dari pembentukan provinsi baru di Indonesia. Endaryanto (2015) menemukan adanya perbedaan struktur ekonomi provinsi baru dan provinsi lama. Iskandar & Nurrahmi (2019) menemukan bahwa provinsi baru tersebut mendapat keuntungan finansial dari perpecahan tersebut. Di sisi lain, Hill (2008) menemukan bahwa daerah termiskin secara umum memiliki kinerja yang sama baiknya dengan rata-rata nasional. Rochmatullah (2020) menemukan bahwa provinsi baru di Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2009.

Dengan demikian, para peneliti menunjukkan bahwa walaupun terdapat beberapa implikasi ekonomi positif dari pembentukan provinsi baru, terdapat juga beberapa implikasi negatif. Dengan kata lain, pembentukan provinsi baru yang bertujuan menumbuhkan kesejahteraan, perlu pertimbangan yang matang dan kajian yang mendalam sebelum memutuskan untuk membentuk provinsi baru di Indonesia.

Pro-Kontra Usulan Provinsi Madura

Tulisan-tulisan berikut menunjukkan bahwa masyarakat Madura akan lebih sejahtera jika Kepulauan Madura menjadi provinsi baru. Habiby (2020) menemukan bahwa pembangunan jembatan Suramadu memberikan dampak positif bagi perekonomian Pulau Madura, antara lain peningkatan pariwisata dan pembangunan infrastruktur. Susilowati 2020 menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemakmuran, sedangkan pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan. Nasih (2019) menemukan bahwa tata kelola lahan kering berdampak positif terhadap produktivitas pertanian, namun berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hefni (2012) menemukan bahwa orang Madura memiliki kearifan lokal tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya Pulau Madura dengan sebaik-baiknya. Secara keseluruhan, tulisan-tulisan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Madura akan lebih sejahtera jika Kepulauan Madura menjadi provinsi baru.. Mayvani (2022) menemukan

bahwa Kabupaten Sumenep dapat menjadi pusat pertumbuhan pariwisata di Madura. Stenross (2007) menyimpulkan bahwa pendekatan tradisional orang Madura dalam bisnis tidak lagi sesuai, dan bahwa diversifikasi dan perubahan pendekatan sekarang diperlukan. Pengusaha maritim di Madura Timur dalam hal ini lebih sukses daripada rekan mereka di Madura Barat, dan diketahui bahwa perbedaan ini terkait dengan perbedaan historis antara kedua daerah. Meskipun tidak ada artikel yang secara eksplisit menjawab pertanyaan "Apa perbedaan budaya dan ekonomi antara Madura dan wilayah lain di Jawa Timur?", Namun artikel-artikel ini memberikan konteks yang mungkin berguna untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Dalam konteks ekonomi, Karyadinata (2020) menunjukkan bahwa pembangunan jembatan Suramadu berdampak positif terhadap perekonomian Pulau Madura. Hal ini terlihat dari peningkatan mobilitas orang dan barang antara Madura dan Surabaya, serta meningkatnya investasi di sektor properti dan industri. Adanya ketidakpastian kebijakan pemerintah telah mempengaruhi investasi dan perekonomian di Madura (Fajrin & Sudarsono, 2019). Di sisi lain, penelitian oleh Andriani (2022) menemukan bahwa pariwisata syariah memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian di Pulau Madura. Dengan memanfaatkan budaya dan nilai-nilai Islam yang khas di Madura, pariwisata syariah dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, beberapa peneliti menunjukkan potensi dan tantangan ekonomi di Madura, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dalam jangka panjang diduga dapat meningkatkan kesejahteraan (Nurif & Hermanto, 2019; Supriyadi, Fauzan, Aisyul Hana, & Rahman, 2021; Surjono & Gunawan, 2018; Yusuf, Muntasa, Sophan, Oseni, & Agustiono, 2021). Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tantangan persyaratan administrasi dalam pengusulan Madura sebagai provinsi baru (Kutsiyah, Abdurahman, Hakim, & Rahman, 2022), namun peluang pengajuannya cukup besar bila mengacu pada tujuan pemekaran wilayah untuk mengembangkan sektor ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura.

Aspek Pertahanan Wilayah

Dalam konteks pertahanan negara, pengembangan atau pemekaran wilayah bisa berefek terhadap upaya-upaya pertahanan dan keamanan (Putri Maharani, Santoso, & Sukendro, 2022). Ada beberapa tinjauan pertahanan keamanan negara menurut demografi, konflik, dan efek tidak langsung yang mungkin disebabkan karena perubahan kewilayahan. Misalnya, ketidaksetaraan dalam suatu wilayah adalah bibit konflik yang tak terhindarkan (Lessmann, 2016; Saideman, 1997). Efek upaya pertahanan keamanan di suatu wilayah dicirikan oleh tingkat pendapatan penduduk dan komposisi etnis (Bakke & Wibbels, 2006). Besley & Persson (2008) menyatakan bahwa konflik menyebabkan investasi yang lebih kecil dalam kapasitas fiskal, sedangkan prospek konflik eksternal (antar negara) umumnya mengarah pada investasi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara besar kecilnya suatu provinsi dengan jumlah personel bela negara (tentara dan cadangan) yang perlu disiapkan. Alesina & Spolaore (1996) menemukan ukuran perdamaian yang terbagi – yaitu, pengurangan pembelanjaan pertahanan di wilayah yang lebih damai – dibatasi oleh proses pemecahan wilayah. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan antara ukuran provinsi dan jumlah personel Pertahanan Nasional mungkin terbatas.

Hubungan antara ukuran provinsi dan jumlah konflik umumnya dikaitkan dengan aspek demografi. Temuan Østby (2011) bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat ketimpangan yang lebih besar antar kelompok masyarakat dapat meningkatkan risiko kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dan ketimpangan dapat meningkatkan risiko konflik. Nazara (2019) menyatakan bahwa tingginya tingkat polarisasi pendapatan, fraksionalisasi etnis, dan ketimpangan pendapatan terkait dengan tingginya kemungkinan konflik di provinsi-provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa polarisasi

pendapatan, fraksionalisasi etnis, dan ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan kemungkinan konflik. Ukuran sebuah provinsi mempengaruhi jumlah konflik di dalam provinsi, lebih sering terjadi di populasi yang lebih besar, dan peningkatan jumlah penduduk sebesar 5% meningkatkan risiko konflik sipil sekitar 6% (Black, 1974; Brückner, 2010). Demikian halnya dengan pernyataan bahwa munculnya ketimpangan ekonomi adalah faktor penimbul konflik (Deiwiks et al., 2012). Semua itu menegaskan bahwa dalam konteks pemekaran wilayah di Indonesia, kehadiran provinsi baru dapat menyebabkan konflik sosial. Selain itu, Mahmood & Malik (2020) menemukan bahwa kurangnya pembangunan di sektor sosial dan lambatnya proses rehabilitasi di wilayah tersebut dapat merusak upaya menjaga stabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial mungkin memiliki efek negatif pada wilayah baru dan wilayah lama bahkan setelah konflik berakhir. Lebih jauh, Istanisa (2021) menemukan bahwa persaingan untuk mewujudkan provinsi baru dapat menyebabkan konflik sosial, dan Wimmer (2009) menyatakan bahwa pengusulan pemekaran wilayah yang dicirikan oleh konfigurasi kekuasaan etnopolitik tertentu lebih mungkin mengalami konflik kekerasan.

Agak kontradiktif dengan pendapat di atas, Wimmer (2009) menegaskan bahwa kerangka pemekaran wilayah umumnya dapat memperbaiki persaingan dan distribusi konflik sehingga dapat mengurangi konflik sosial.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, aspek pertahanan wilayah adalah salah satu tinjauan penting dalam pemekaran wilayah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif pertahanan negara dalam pengusulan Madura menjadi provinsi baru di Indonesia. Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis dampak pemekaran wilayah terhadap keamanan dan stabilitas nasional, khususnya dalam hal hubungan antar wilayah, aspek-aspek risiko politik yang mungkin terjadi, termasuk risiko tidak langsung terhadap pertahanan keamanan, seperti konflik identitas, konflik pembangunan infrastruktur, ketergantungan keuangan, dan konflik kebijakan publik.

Makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang dampak pemekaran wilayah terhadap pertahanan keamanan (stabilitas nasional), dengan studi kasus pengusulan Madura menjadi provinsi baru. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam pengusulan pemekaran wilayah, sehingga dapat meminimalkan risiko konflik wilayah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan nasional.

Metode

Studi ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara berurutan (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan kuantitatif akan memanfaatkan data sekunder dari BPS, Kemhan, dan Polri. Temuan data kuantitatif akan dijadikan masukan dalam perolehan data kualitatif dengan cara menyampaikan temuan menjadi tema wawancara dengan informan kunci, seperti pejabat pemerintah, akademisi, aktivis masyarakat, dan pemimpin masyarakat di Madura dan Jawa Timur. Disamping itu, data sekunder lainnya seperti dokumen-dokumen kebijakan dan laporan penelitian sebelumnya juga dikumpulkan dan dianalisis untuk mengkonfirmasi tema wawancara. Selanjutnya analisis tema diterapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam pengusulan Madura menjadi provinsi baru.

Temuan dan Diskusi

Alasan Usulan Pemekaran Madura menjadi Provinsi

Berikut adalah data statistik pulau Madura yang diusulkan menjadi provinsi baru sebagai pemekaran Provinsi Jawa Timur. Penduduk Madura total pada Tahun 2022 adalah 4.065.232 jiwa dengan kepadatan 755 jiwa/km². Jumlah penduduk menurut Kabupaten: Bangkalan (1.086.620 jiwa), Sampang (984.162 jiwa), Pamekasan (857.818 jiwa), dan Sumenep (1.136.632 jiwa). Luas daratan 5.422 km² (11.3% luas daratan Jawa Timur) dan luas perairan laut km². Panjang daratan dari ujung barat sampai dengan ujung timur sekitar 160 kilometer dan lebarnya sekitar 40 kilometer. Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten. Dengan Luas wilayah untuk kabupaten Bangkalan 1.144, 75 km² terbagi dalam 8 wilayah kecamatan, kabupaten Sampang berluas wilayah 1.321,86 km², terbagi dalam 12 kecamatan, Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km², yang terbagi dalam 13 kecamatan, dan kabupaten Sumenep mempunyai luas wilayah 1.857,530 km², terbagi dalam 27 kecamatan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan. Dengan demikian Kabupaten Sumenep memungkinkan untuk dimekarkan menjadi dua kabupaten yakni menjadi Kabupaten Sumenep dan Kepulauan Kangean. Karakteristik pesisir Kepulauan Madura mempunyai banyak variasi dari adanya vegetasi mangrove, pantai berpasir, laut dangkal, pulau kecil, dan terumbu karang. Potensi-potensi tersebut umumnya belum tereksplorasi karena minimnya aksesibilitas menuju ke pulau-pulau terbatas. Fasilitas-fasilitas di pulau-pulau selain Pulau Madura, seperti di Kangean dan Raas, dukungan sarana pariwisata adalah minim, hal ini ditunjukkan belum adanya fasilitas penginapan dan sedikitnya rumah makan. Peningkatan fasilitas pendukung sangat dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi pulau-pulau terpencil. Transportasi laut untuk transportasi sangat diperlukan dalam memasarkan produk-produk hasil laut dari masyarakat pesisir.

Pengaruh Pemekaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Mempelajari pengaruh pemekaran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, misalnya mengacu pada saat empat provinsi di Kalimantan dimekarkan menjadi lima provinsi, yakni bertambah Provinsi Kalimantan Utara. Pada kasus ini, apakah terdapat perbedaan signifikan pertumbuhan Kalimantan sebelum dan sesudah pemekaran provinsi (Kalimantan Utara), kita dapat membandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan dari tahun 2010-2013 terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan dari tahun 2014-2020. PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2020 memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling progresif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10.94%. Berikut adalah hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada dua periode tersebut:

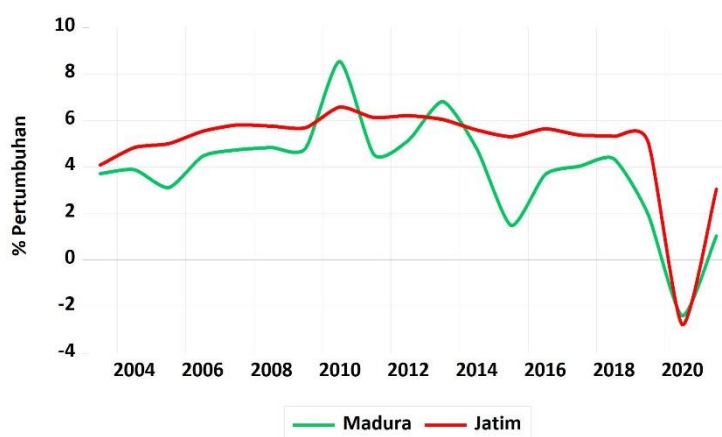
- Tahun 2010-2013 (4 provinsi): 5,62%
- Tahun 2014-2020 (5 provinsi): 5,77%

Dari hasil perhitungan tersebut, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada periode tahun 2010-2013 dengan empat provinsi hampir sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada periode tahun 2014-2020 setelah pemekaran provinsi menjadi lima. Dengan demikian, tidak terlihat adanya perbedaan signifikan antara pertumbuhan ekonomi Kalimantan sebelum dan sesudah pemekaran provinsi. Untuk menunjukkan signifikansi statistik dari perbedaan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan sebelum dan sesudah pemekaran provinsi, kita dapat melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji-t. Dengan hipotesis nol (H₀) bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan sebelum dan sesudah pemekaran provinsi dan hipotesis alternatif (H_a) bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan sebelum dan sesudah pemekaran provinsi. Dari data yang diberikan, untuk periode tahun 2010-2013 dengan empat provinsi, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,62%. Sedangkan untuk periode tahun

2014-2020 dengan lima provinsi, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,77%. Dengan menggunakan uji-t, didapatkan hasil uji sebesar $t = -0,30$ dan p-value sebesar 0,7691. Dengan taraf signifikansi 5%, nilai kritis t adalah $\pm 2,306$. Karena nilai t hasil uji ($-0,30$) lebih kecil dari nilai t kritis ($-2,306$), maka tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol (H_0) dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan sebelum dan sesudah pemekaran provinsi. Dengan demikian, secara statistik tidak terdapat perbedaan signifikan antara pertumbuhan ekonomi Kalimantan sebelum dan sesudah pemekaran provinsi pada tingkat kepercayaan 95%.

Pertumbuhan Ekonomi di Madura

Gambar 1 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Madura 2003-2021 berada di bawah kabupaten/kota Jawa Timur.



Sumber: BPS (data diolah)

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Madura dan Kota/Kabupaten lainnya di Jawa Timur 2003-2021

Berdasarkan hasil *Pairwise Granger Causality Tests* pada Tabel 1, terdapat dua hipotesis yang diuji, yaitu apakah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (JATIM) *Granger Cause* Madura, dan apakah Madura *Granger Cause* Jawa Timur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 0.05, terdapat bukti yang cukup bahwa terdapat hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Madura, di mana Jawa Timur dapat memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi variabel Madura pada periode berikutnya, dan demikian pula sebaliknya. Hasil itu sejalan dengan temuan Amar & Arkum (2021) bahwa tidak ada perbedaan kinerja pembangunan manusia dan pembangunan sosial pasca pemekaran wilayah, atau walaupun ada perbedaan kinerja pembangunan ekonomi namun perbedaannya kecil. Hal itu membawa kita pada dugaan bahwa pemekaran Madura menjadi provinsi tidak akan mengganggu kinerja ekonomi provinsi Jawa Timur.

Tabel 1. Uji Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi Madura dan Jawa Timur

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
JATIM does not Granger Cause MADURA	17	0.346	0.7143
MADURA does not Granger Cause JATIM		1.00701	0.3942

Berikutnya, Tabel 2 adalah analisis dengan uji hipotesis untuk kesetaraan rata-rata (*Equality of Means*) antara dua seri, yaitu seri JATIM dan seri MADURA, selama 19 tahun (2003-2021). Sebagai catatan, seri JATIM adalah data rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tanpa data keempat Kabupaten di Madura. Terdapat empat jenis uji hipotesis yang digunakan di sini, yaitu uji t, uji t Satterthwaite-Welch, uji F ANOVA, dan uji F Welch. Semua hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa probabilitas untuk menolak hipotesis nol bahwa kedua seri memiliki rata-rata yang sama adalah 0,1287 atau 0,1288. Hal ini menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis nol bahwa kedua seri memiliki rata-rata yang sama pada tingkat kepercayaan 95%. Selain itu, analisis juga menunjukkan bahwa rata-rata seri JATIM lebih tinggi daripada rata-rata seri MADURA selama 19 tahun, namun, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%.

Tabel 2. Test for Means Equality of PDRB Between Jawa Timur and Madura

Sample: 2003 2021 (Included observations: 19)

Method	df	Value	Probability
t-test	36	1.5552	0.1287
Satterthwaite-Welch t-test*	35.5475	1.5552	0.1288
Anova F-test	(1, 36)	2.4186	0.1287
Welch F-test*	(1, 35.5475)	2.4186	0.1288

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance			
Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	1	11.2815	11.2815
Within	36	167.9214	4.664483
Total	37	179.2029	4.843322

Category Statistics				
Variable	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err.of Mean
JATIM	19	4.9639	2.0343	0.4667
MADURA	19	3.8742	2.2783	0.5227
All	38	4.4191	2.2008	0.3570

Sumber: BPS (data diolah)

Untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata pengeluaran per kapita di Madura dengan Kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur kami menggunakan Uji Anova. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata pengeluaran per kapita di kedua kawasan tersebut pada tingkat signifikansi 5% ($F = 59.84$, $p < 0.05$). Selanjutnya, melalui uji POST-HOC untuk melihat perbandingan antar kelompok. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita di Madura relatif lebih rendah secara keseluruhan pada setiap tahunnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata pengeluaran per kapita di Madura dan kabupaten/kota di Jawa Timur, dan pengeluaran per kapita di Madura relatif lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur secara keseluruhan.

Pada Tabel 3 ditunjukkan perubahan kesenjangan antara 2003-2021 di kabupaten/kota Jawa Timur yang diukur dengan *Modified Williamson Index* (mWI) (Atkinson & Brandolini, 2001; Bourguignon & Morrisson, 2002; Duclos & Araar, 2006; Frankema & Marks, 2010). mWI dihitung dengan formula:

$$mWI = (PP_{2021} - PP_{2003}) / \log(PP_{2021} / PP_{2003}) \quad (1)$$

Formula mWI tersebut merupakan salah satu varian dari formula *Williamson Index* dan disebut sebagai "*modified Williamson Index*" atau "*Williamson Index with geometric*

mean" yang digunakan untuk menghitung kesenjangan relatif antara dua periode waktu, di mana variabel yang diukur memiliki distribusi lognormal.

Tabel 3. Modified Williamson Index 2003-2021 pada Kabupaten Kota di Jawa Timur

Kabupaten/Kota	PP_2003	PP_2021	mWI
Bangkalan	80.00%	89.85%	1.95
Banyuwangi	371.31%	110.21%	4.95
Batu	350.39%	87.27%	4.36
Blitar	719.08%	161.13%	8.59
Bojonegoro	465.26%	196.89%	7.19
Bondowoso	80.84%	207.55%	3.09
Gresik	612.69%	133.10%	7.23
Jember	265.87%	72.94%	3.43
Jombang	623.57%	113.21%	6.89
Kediri	331.25%	86.11%	4.19
Lamongan	461.98%	117.26%	5.79
Lumajang	652.93%	129.45%	7.45
Madiun	809.12%	292.52%	11.69
Magetan	86.09%	209.10%	3.19
Malang	207.92%	73.23%	2.97
Mojokerto	77.60%	150.47%	2.53
Nganjuk	624.81%	151.16%	7.69
Ngawi	54.77%	123.43%	1.95
Pacitan	76.81%	196.17%	2.93
Pamekasan	73.19%	185.26%	2.78
Pasuruan	432.36%	96.28%	5.15
Ponorogo	643.18%	155.30%	7.91
Probolinggo	487.89%	134.58%	6.32
Sampang	80.00%	10.44%	0.79
Sidoarjo	381.96%	93.22%	4.71
Situbondo	101.20%	127.24%	2.62
Sumenep	53.62%	80.88%	1.53
Surabaya	237.64%	69.09%	3.14
Trenggalek	709.31%	231.14%	9.82
Tuban	580.62%	115.68%	6.64
Tulungagung	741.52%	159.70%	8.73

Sumber: BPS (data diolah)

Catatan: Modified Williamson Index (mWI), Pendapatan Rata-rata (PR) dan Persentase Pendapatan (PP)

Yang perlu diperhatikan adalah terdapat perbedaan cara interpretasi antara *Standard Williamson Index* (sWI) dan *Modified Williamson Index* (mWI). Pada sWI, angka indeks yang mendekati 1 menunjukkan semakin tingginya ketimpangan dalam pembangunan, sedangkan angka indeks yang lebih kecil dari 1 menunjukkan penurunan ketimpangan. Sementara pada mWI adalah perbandingan sWI antar periode. Angka indeks yang lebih besar dari 1 menunjukkan adanya perbaikan terhadap ketimpangan di daerah, sedangkan angka indeks yang lebih kecil dari 1 menunjukkan ketimpangan yang meningkat. Dalam interpretasi mWI, semakin besar angka indeks yang lebih besar dari 1, semakin besar perbaikan yang terjadi dalam ketimpangan pembangunan antar daerah, dan semakin kecil angka indeks yang lebih kecil dari 1, semakin besar peningkatan ketimpangan antar daerah.

Dari tabel 3 tersebut, dapat dilihat bahwa daerah dengan mWI yang tinggi menunjukkan tingkat perbaikan kesenjangan pendapatan yang besar antara tahun 2003 dan 2021. Daerah dengan WI tertinggi adalah Madiun dengan mWI sebesar 11.69, diikuti oleh Trenggalek dengan mWI sebesar 9.82 dan Blitar dengan mWI sebesar 8.59. Sedangkan daerah dengan mWI terendah adalah Sampang sebesar 0.79, Sumenep sebesar 1.53, dan

Ngawi sebesar 1.95. Perlu dicatat juga bahwa keempat Kabupaten di Madura memiliki relatif mWI lebih rendah dari rata-rata mWI daerah lainnya di Jawa Timur.

Pesan penting yang terkandung dalam hasil perhitungan Williamson Index adalah bahwa Madura selama periode 2003-2021 belum menunjukkan keberhasilan mengatasi kesenjangan sebagaimana hasil di sebagian besar daerah di Jawa Timur. Bila mengacu pada aspek pertahanan keamanan bahwa kesenjangan adalah pemicu konflik, sebagaimana telah diteliti (Mahmood & Malik, 2020; Pasaribu, 2015; Wimmer et al., 2009), maka adalah wajar bila warga Madura bersikukuh mengusulkan Madura sebagai provinsi baru. Singkatnya, temuan itu menunjukkan adanya kewajaran pada perlunya upaya lebih lanjut untuk memperbaiki pembangunan ekonomi di Madura agar dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasaribu, 2015).

Kerawanan dan Peluang Konflik

Hubungan kerawanan yang mungkin terjadi antara provinsi hasil pemekaran dengan provinsi asal tergantung pada banyak faktor, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (pembangunan), kondisi sosial, dan faktor-faktor geografis. Beberapa kemungkinan hubungan antara provinsi hasil pemekaran dengan provinsi asal adalah sebagai berikut:

- Terjadi peningkatan kerawanan di provinsi asal karena sumber daya dan pendapatan terbagi menjadi dua wilayah (Aini, 2015), dan karena terjadi ketimpangan (Deiwiks et al., 2012)
- Terjadi peningkatan kerawanan di provinsi hasil pemekaran karena infrastruktur dan layanan publik masih kurang baik di wilayah tersebut (Booth, 2011).
- Tidak ada perubahan signifikan pada tingkat kerawanan di kedua provinsi karena pemekaran wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah (Udiarto, 2015).
- Terjadi penurunan kerawanan di provinsi asal karena pemekaran wilayah dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah (Ishak & Ernanda, 2021).

Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui secara pasti dampak pemekaran wilayah terhadap tingkat kerawanan di provinsi asal dan provinsi hasil pemekaran. Dalam konteks studi ini, analisis dilakukan dengan menggunakan berbagai metode statistik dan penelitian lapangan, antara lain adalah Indeks Kerawanan Relatif (IKR). Lihat Tabel 4.

Angka Kerawanan diperoleh dengan data proxy Jumlah kejahatan dan Jumlah Bencana per kabupaten. Indeks Kerawanan relatif (IKR) diperoleh dengan membandingkan Angka kerawanan per kabupaten/kota dengan total angka kerawanan di Jawa Timur. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi IKR, dilakukan pendekatan regresi dengan regressor X1 (pertumbuhan ekonomi relatif kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur), X2 (Angka penduduk relatif), dan X3 (Angka Kemiskinan relatif).

IKR sebagaimana ditunjukkan Tabel 4 dilakukan dengan pendekatan model Robust Least Square. Analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Indeks Pertumbuhan Relatif (X1), Indeks Jumlah Penduduk relatif (X2), dan Indeks Kemiskinan Relatif (X3) secara signifikan mempengaruhi Indeks Kerawanan Relatif (dependent variable). Hal ini terbukti dari nilai Prob < 0,05 (signifikan secara statistik) pada kolom Prob. Dari hasil regresi tersebut, didapatkan koefisien regresi (Coefficient) pada variabel X1 sebesar 0.118921, yang berarti jika terjadi kenaikan satu satuan pada variabel Indeks Pertumbuhan Relatif (X1), maka Indeks Kerawanan Relatif akan meningkat sebesar 0.118921 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Sementara itu, koefisien regresi pada variabel X2 sebesar 0.736468, yang berarti jika terjadi kenaikan satu satuan pada variabel Indeks Jumlah Penduduk (X2), maka Indeks Kerawanan Relatif akan meningkat sebesar

0.736468 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Koefisien regresi pada variabel X3 adalah -0.201634, yang berarti jika terjadi kenaikan satu satuan pada variabel Indeks Kemiskinan Relatif (X3), maka Indeks Kerawanan Relatif akan menurun sebesar 0.201634 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai R-squared sebesar 0.230740, yang berarti 23.07% variabilitas pada Indeks Kerawanan Relatif dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Sementara itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0.175793, yang menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian (penalti) pada nilai R-squared akibat adanya penambahan variabel independen. Selain itu, nilai *Rw-squared* yang sama dengan nilai R-squared menunjukkan bahwa tidak ada observasi yang outlier. Hal ini didukung oleh nilai Prob (*Rn-squared stat.*) sebesar 0.000000, yang menunjukkan bahwa model regresi yang dibuat signifikan secara keseluruhan.

Tabel 4. Analisis Indeks Kerawanan Relatif Kabupaten/kota di Jawa Timur

Dependent Variable: INDEKS_KERAWANAN_RELATIF (IKR)

Method: Robust Least Squares; M-estimation; Included observations: 31

M settings: weight=Cauchy, tuning=1.5, scale=MAD (median centered)

Huber Type III Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
X1	0.1189	0.0062	19.3474	0.0000
X2	0.7365	0.0032	228.9773	0.0000
X3	-0.2016	0.0030	-66.6355	0.0000
Robust Statistics				
R-squared	0.2307	Adjusted R-squared		0.1758
Rw-squared	0.7352	Adjust Rw-squared		0.7352
Akaike info criterion	49.8984	Schwarz criterion		60.2003
Deviance	16.2743	Scale		0.5711
Rn-squared statistic	1.03E+19	Prob(Rn-squared stat.)		0.0000
Non-robust Statistics				
Mean dependent var	2.9079	S.D. dependent var		3.7631
S.E. of regression	2.7931	Sum squared resid		218.4338

Sumber: BPS (data diolah)

Hasil regresi ini dapat digunakan untuk memperkuat bukti atau argumentasi dalam keputusan kebijakan terkait upaya menurunkan Indeks Kerawanan Relatif dengan mengoptimalkan variabel independen yang signifikan dalam analisis ini. Berdasarkan analisis RLS di atas, terdapat tiga variabel independen yang berpengaruh terhadap indeks kerawanan relatif, yaitu indeks pertumbuhan relatif, indeks jumlah penduduk, dan indeks kemiskinan relatif. Oleh karena itu, untuk menurunkan indeks kerawanan relatif di wilayah Jawa Timur, perlu dilakukan upaya pengelolaan ketiga variabel tersebut. Beberapa implikasi dari pengelolaan ketiga variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Pengembangan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui investasi dalam sektor-sektor strategis, seperti industri, pertanian, pariwisata, dan infrastruktur. Investasi ini akan meningkatkan daya tarik wilayah dan membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan indeks pertumbuhan relatif dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Perencanaan kebijakan pembangunan wilayah yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, seperti ketersediaan fasilitas publik, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kebijakan pembangunan wilayah ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dapat menurunkan indeks kerawanan relatif.

Program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kerja, pendidikan, dan bantuan modal usaha, dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan

mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini akan meningkatkan indeks jumlah penduduk dan mengurangi indeks kemiskinan relatif.

Tabel 5. Hubungan Perubahan Kepadatan Penduduk Terhadap Rata-Rata Kejahatan Tahunan

Dependent Variable: RATA2_KEJAHATAN_TAHUNAN 2000-2020

Method: Least Squares

Sample: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RATA2_P_TAHUNAN	0.5062	0.0628	8.0659	0.0005
C	-12.8033	3.4183	-3.7455	0.0134
R-squared	0.92863	Mean dependent var		12.1410
Adjusted R-squared	0.91436	S.D. dependent var		13.1659
S.E. of regression	3.85297	Akaike info criterion		5.7705
Sum squared resid	74.22678	Schwarz criterion		5.7551
Log likelihood	-18.19682	Hannan-Quinn criter.		5.5795
F-statistic	65.05860	Durbin-Watson stat		2.0915
Prob(F-statistic)	0.00047			

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 6. Hubungan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Rata-Rata Kejahatan Tahunan

Dependent Variable: RATA2_KEJAHATAN_TAHUNAN 2000-2020

Method: Least Squares

Sample: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LP	10.1201	1.4080	7.1877	0.0008
C	-10.9990	3.6037	-3.0521	0.0284
R-squared	0.9118	Mean dependent var		12.1410
Adjusted R-squared	0.8941	S.D. dependent var		13.1659
S.E. of regression	4.2843	Akaike info criterion		5.9827
Sum squared resid	91.7754	Schwarz criterion		5.9673
Log likelihood	-18.9396	Hannan-Quinn criter.		5.7917
F-statistic	51.6625	Durbin-Watson stat		1.9196
Prob(F-statistic)	0.0008			

Sumber: BPS (data diolah)

Dalam konteks usulan pemekaran wilayah Jawa Timur, pengelolaan ketiga variabel di atas harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan geografis yang mempengaruhi tingkat kerawanan relatif di wilayah tersebut. Dengan mengelola ketiga variabel tersebut dengan baik, diharapkan pemekaran wilayah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kerawanan relatif di wilayah tersebut.

Terkait kerawanan tersebut, menggunakan data kejahatan tahun 2000 hingga 2020 pada seluruh propinsi (BPS, 2022), kami memperoleh hubungan-hubungannya dengan pertumbuhan dan kepadatan penduduk, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5 dan 6.

Dari Tabel 5 dan 6 kita bisa melihat bahwa bila kepadatan penduduk tidak berubah maka rata-rata kejahatan akan menurun 12.8 unit. Sementara bila tidak terjadi pertumbuhan penduduk maka rata-rata kejahatan akan menurun 11 unit.

Diskusi terhadap Temuan

Masalah geografis seperti masalah penegasan perbatasan antara wilayah provinsi baru dengan provinsi di sekitarnya memerlukan penegasan batas secara legal formal. Contoh kasus ini misalnya antara Banten dan Jawa Barat (Saputra, 2021). Penegasan perbatasan

yang mungkin menjadi permasalahan dalam usulan pemekaran Madura menjadi provinsi adalah penegasan perbatasan perairan laut. Permasalahan ini akan mencuat mengingat kawasan laut di sekitar Madura kaya sumber daya.

Berikut adalah hasil pemetaan tematik hasil wawancara dan diskusi yang menyodorkan hasil temuan kuantitatif. Lihat Tabel 7. Wawancara dilakukan pada 16 orang narasumber di empat kabupaten Madura (masing-masing dua responden) dan dua kabupaten kota di Jawa Timur (masing-masing empat responden).

Tabel 7. Tema Wawancara dan Diskusi Berbasis Temuan Analisis Kuantitatif

Tema (basis Temuan Analisis Kuantitatif)	Persetujuan Responden	Interpretasi & Catatan
1. Provinsi Jawa Timur layak dimekarkan mengingat luas wilayah dan pertumbuhan penduduknya	12 setuju, 1 tidak setuju, 3 netral	Mayoritas setuju
2. Kausalitas hubungan ekonomi yang signifikan (dua arah) antara Madura dan Jawa Timur merupakan faktor penimbul konflik bila Madura menjadi provinsi baru	6 setuju, 8 tidak setuju, 2 tidak tahu	-
3. Pertumbuhan ekonomi Madura yang relatif lebih rendah adalah alasan pemekaran – tujuan usulan pemekaran adalah memacu pertumbuhan ekonomi Madura	13 setuju, 3 tidak setuju, 0 netral	Mayoritas setuju
4. Jawa Timur belum sepenuhnya berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan adalah alasan pemekaran wilayah Madura agar lebih cepat memenuhi pemerataan kesejahteraan	9 setuju, 4 tidak setuju, 3 netral	Mayoritas setuju
5. Akan terjadi peningkatan kerawanan di Jawa Timur karena sumber daya dan pendapatan terbagi menjadi dua wilayah.	9 setuju, 2 tidak setuju, 5 netral	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas setuju • Konflik kepentingan harus ditangani
6. Terjadi peningkatan kerawanan di provinsi hasil pemekaran karena infrastruktur dan layanan publik masih kurang baik di wilayah tersebut.	11 setuju, 0 tidak setuju, 5 netral	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas setuju • Konsekuensi: biaya pemekaran harus dipenuhi
7. Tidak ada perubahan signifikan pada tingkat kerawanan di kedua provinsi bila pemekaran wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.	16 setuju, 0 tidak setuju, 0 netral	Semua setuju
8. Terjadi penurunan kerawanan di provinsi asal karena pemekaran wilayah dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah	16 setuju, 0 tidak setuju, 0 netral	Semua setuju
9. Penegasan batas secara legal formal harus ditetapkan secara dini (sejak penetapan pemekaran wilayah)	16 setuju, 0 tidak setuju, 0 netral	Semua setuju
10. Pemekaran wilayah mendukung penguatan pertahanan keamanan di Jawa Timur dan Madura	12 setuju, 4 tidak setuju, 0 netral	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas setuju • Konsekuensi: biaya hankam harus dipenuhi

Sumber: Penulis

Tabel 7 menunjukkan hasil dari wawancara dan diskusi yang dilakukan berdasarkan temuan analisis kuantitatif. Terdapat 10 tema yang dibahas, di antaranya adalah pemekaran wilayah, kausalitas hubungan ekonomi antara Madura dan Jawa Timur, alasan pemekaran wilayah Madura, peningkatan dan penurunan kerawanan, perubahan tingkat kerawanan, penegasan batas secara legal formal, dan penguatan pertahanan keamanan. Mayoritas responden setuju bahwa Jawa Timur layak dimekarkan karena luas wilayah dan pertumbuhan penduduknya. Mayoritas responden juga setuju bahwa pemekaran wilayah Madura dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah, namun hal tersebut memerlukan biaya yang harus dipenuhi. Selain itu, responden setuju bahwa konflik kepentingan harus ditangani agar tidak terjadi peningkatan kerawanan di Jawa Timur akibat sumber daya dan pendapatan yang terbagi menjadi dua wilayah. Hal lain yang disepakati adalah pentingnya penegasan batas secara legal formal sejak penetapan pemekaran wilayah, serta pemekaran wilayah yang dapat mendukung penguatan pertahanan keamanan di Jawa Timur dan Madura. Persetujuan para responden pada dasarnya menguatkan temuan riset terdahulu, seperti (Wimmer et al., 2009) yang menunjukkan bahwa konfigurasi kekuasaan etnopolitik tertentu lebih mungkin mengalami konflik kekerasan sehingga penting memperbaiki persaingan dan konflik distribusi. Dengan kata lain, pemekaran Jawa Timur menjadikan Provinsi Madura dengan etnik suku Madura akan lebih dapat mengurangi konflik sosial. Usulan pemekaran Madura menjadi provinsi baru juga sejalan dengan pendapat (Mahmood & Malik, 2020) yakni pemekaran dapat mengatasi kurangnya pembangunan di sektor sosial dan mempercepat proses rehabilitasi sebagai upaya menjaga keamanan wilayah berkelanjutan.

Simpulan

Sesuai dengan pertanyaan studi ini “Bagaimana perspektif pertahanan keamanan terhadap pengusulan pemekaran provinsi? Dalam studi kasus pengusulan Madura sebagai provinsi baru, apa saja dampaknya terhadap pertahanan keamanan?” Jawaban dari studi ini tentang perspektif pertahanan keamanan terhadap pengusulan pemekaran provinsi adalah pemekaran dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah yang akan berefek positif terhadap pertahanan keamanan, dengan konsekuensi penyediaan biaya yang harus dipenuhi dan penanganan dini konflik kepentingan. Temuan lainnya adalah pemekaran wilayah dapat mengurangi konflik sosial dan mempercepat proses rehabilitasi sebagai upaya menjaga pertahanan keamanan wilayah yang berkelanjutan. Dalam studi kasus pengusulan Madura sebagai provinsi baru, studi ini mengidentifikasi adanya implikasi pemekaran wilayah terhadap pertahanan keamanan, yakni: implikasi peningkatan belanja operasional territorial pertahanan keamanan; adanya peningkatan kerawanan di provinsi asal karena sumber daya dan pendapatan terbagi menjadi dua wilayah; peningkatan kerawanan di provinsi hasil pemekaran terkait kendala awal layanan dalam periode transisi; ada bukti dimana tidak ada perubahan signifikan pada tingkat kerawanan di kedua provinsi bila pemekaran wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah; dan perlunya penegasan sejak dini perbatasan wilayah pemekaran untuk minimalisasi konflik. Pada akhirnya, studi perspektif pertahanan keamanan dalam pemekaran wilayah menunjukkan bahwa pengusulan provinsi Madura sebagai pemekaran Provinsi Jawa Timur adalah layak. Namun demikian perspektif lainnya perlu ditinjau sebagai bentuk kehati-hatian pengambilan keputusan. Penelitian berikutnya dapat fokus pada analisis dampak pemekaran wilayah terhadap pertahanan keamanan serta penanganan konflik kepentingan yang dapat timbul.

Penafian (Disclaimer)

Isi tulisan ini sepenuhnya mencerminkan pendapat dan hasil analisis dari para penulis dan tidak terkait dengan afiliasi institusi atau organisasi manapun. Para penulis tidak

bertanggung jawab atas penggunaan informasi atau data yang terdapat dalam tulisan ini, dan tidak membuat jaminan atau representasi apapun mengenai keakuratan, kelengkapan, keandalan, atau kebermanfaatan dari informasi yang disajikan. Para penulis tidak menerima atau memiliki hubungan kepentingan finansial atau non-finansial yang terkait dengan organisasi atau produk yang dibahas dalam tulisan ini. Kesalahan atau ketidakakuratan apapun yang ditemukan dalam tulisan ini adalah tanggung jawab para penulis.

Referensi

- Aini, N. (2015). Domestifikasi etnisitas: Pemekaran wilayah dan rutinisasi kekerasan antar etnis di Maluku Utara. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 103. doi: 10.22146/jps.v1i1.23434
- Alamsyah, M. N., & Subekti, V. S. (2017). The role of expansion movement in the establishment of new region in Indonesia: A study of Parigi Moutong Regency. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 9(1), 115–135. doi: 10.15294/komunitas.v9i1.7710
- Alesina, A., & Spolaore, E. (1996). *International Conflict, Defense Spending and the Size of Countries* (No. w5694; p. w5694). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. doi: 10.3386/w5694
- Amar, H., & Arkum, D. (2021). Perbandingan kinerja pembangunan manusia dan sosial ekonomi pasca pemekaran wilayah. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 55–63. doi: 10.31289/publika.v9i2.5938
- Andriani, N., Jannah, M., & Andrianingsih, V. (2022). Key determinants of intention to visit halal tourism in Madura. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 262–275. doi: 10.26740/aluqud.v6n2.p262-275
- Atkinson, A. B., & Brandolini, A. (2001). Promise and pitfalls in the use of “secondary” data-sets: Income inequality in OECD countries as a case study. *Journal of Economic Literature*, 39(3), 771–799. doi: 10.1257/jel.39.3.771
- Bakke, K. M., & Wibbels, E. (2006). Diversity, disparity, and civil conflict in Federal States. *World Politics*, 59(1), 1–50. doi: 10.1353/wp.2007.0013
- Besley, T., & Persson, T. (2008). Wars and state capacity. *Journal of the European Economic Association*, 6(2–3), 522–530. doi: 10.1162/JEEA.2008.6.2-3.522
- Black, G. S. (1974). Conflict in the community: A theory of the effects of community size. *American Political Science Review*, 68(3), 1245–1261. doi: 10.2307/1959160
- Booth, A. (2011). Splitting, splitting and splitting again: A brief history of the development of regional government in Indonesia since independence. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 167(1), 31–59. doi: 10.1163/22134379-90003601
- Bourguignon, F., & Morrisson, C. (2002). Inequality among world citizens: 1820–1992. *American Economic Review*, 92(4), 727–744. doi: 10.1257/00028280260344443
- BPS, I. (2022). *Statistik Kriminal 2021*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Brückner, M. (2010). Population size and civil conflict risk: Is there a causal link? *The Economic Journal*, 120(544), 535–550. doi: 10.1111/j.1468-0297.2010.02352.x
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. In H. Salmon (Ed.), *SAGE*. Singapore: SAGE Publications, Inc. All.
- Deiwiks, C., Cederman, L.-E., & Gleditsch, K. S. (2012). Inequality and conflict in federations. *Journal of Peace Research*, 49(2), 289–304. doi: 10.1177/0022343311431754
- Duclos, J.-Y., & Araar, A. (2006). *Poverty and equity: Measurement, policy and estimation with DAD*. doi: 10.13016/OAL5-DBE7
- Duncan, C. R. (2007). Mixed outcomes: The impact of regional autonomy and decentralization on indigenous ethnic minorities in Indonesia. *Development and Change*, 38(4), 711–733. doi: 10.1111/j.1467-7660.2007.00430.x
- Elia, A., Yulianto, Y., Tiawon, H., Sustiyah, S., & Indrajaya, K. (2020). Government expenditure and poverty reduction in the proliferation of new administrative areas of Central Kalimantan, Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 3(2), 145. doi: 10.31328/jsed.v3i2.1410

- Endaryanto, T., Firdaus, M., Siregar, H., & Budiman, D. (2015). The impact of regional expansion on economic structure: A case study in Lampung Province, Indonesia. *International Journal of Sciences*, 23(2).
- Fajrin, V., & Sudarsono, H. (2019). Analisis pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1). doi: 10.35448/jequ.v9i1.5434
- Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser *, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 57–79. doi: 10.1080/00074910500072690
- Frankema, E., & Marks, D. (2010). Growth, stability, but what about equity? Reassessing Indonesian inequality from a comparative perspective. *Economic History of Developing Regions*, 25(1), 75–104. doi: 10.1080/20780389.2010.505007
- Habiby, F. I. (2020). Dampak pembangunan jembatan Suramadu terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Bangkalan ditinjau dari teori Harrod-Domar dengan teori Lokasi Weber. *JURNAL GEOGRAFI Geografi Dan Pengajarannya*, 18(1), 77. doi: 10.26740/jggp.v18n1.p77-90
- Hill, H., Resosudarmo, B. P., & Vidyattama*, Y. (2008). Indonesia's changing economic geography. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(3), 407–435. doi: 10.1080/00074910802395344
- Ishak, I., & Ernanda, O. (2021). Regional politics: Penetrating indigenous rights in regional expansion in Nagari Salareh Aia, Palembang District, Agam Regency, West Sumatra Province in 2020. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 501–511. doi: 10.21787/jbp.13.2021.501-511
- Iskandar, M., & Nurrahmi, F. (2019). Analysis of economic potentials, transformation of shifting structures and economic specialization: Post territorial split in Aceh. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 6(3), 38–45. doi: 10.18510/hssr.2018.636
- Istania, R. (2021). How do ethnic groups compete for a new province in a decentralised Indonesia? *Asian Journal of Political Science*, 29(3), 316–337. doi: 10.1080/02185377.2021.1993944
- Kadaryanto, B. (2018). Implikasi pembentukan daerah persiapan otonom baru dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(2). doi: 10.29313/aktualita.v1i2.3998
- Karyadinata, C. H. K., Pudjihardjo, M., Manzilati, A., & Syafitri, W. (2020). The impact of Suramadu Bridge on rural poverty in Kabupaten Bangkalan, East Java, Indonesia. *KnE Social Sciences*. doi: 10.18502/kss.v4i7.6848
- Kutsiyah, F., Abdurahman, A., Hakim, R., & Rahman, A. (2022). Persyaratan dasar pemekaran wilayah pamekasan dalam upaya mendukung pembentukan Provinsi Madura. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(3), 158–167. doi: 10.55678/prj.v10i3.729
- Lessmann, C. (2016). Regional inequality and internal conflict. *German Economic Review*, 17(2), 157–191. doi: 10.1111/geer.12073
- Mahmood, T., & Malik, M. (2020). Protracted social conflict in the globalized world: The case of Newly Merged Tribal Districts (NMTDs) in Pakistan. *NUST Journal of International Peace & Security*, III(2), 60–70.
- Mayvani, T. C., Afin, R., Idialis, A. R., & Sariyani, S. (2022). Analysis of growth and tourism clusters in Madura. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(1), 59. doi: 10.17977/um002v14i12022p059
- Najmuddin, Z. (2020). The impact of government expenditure on Banten economic growth in 2010 – 2017. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(1), 54–64. doi: 10.36574/jpp.v4i1.104
- Nazara, S., Hartono, D., & Sumarto, S. (2019). Roles of income polarization, income inequality and ethnic fractionalization in social conflicts: An empirical study of Indonesian Provinces, 2002–2012. *Asian Economic Journal*, 33(2), 165–190. doi: 10.1111/asej.12179
- Nurif, M., & Hermanto, H. (2019). The development study of Madura Area (an area marketing approach). *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 6(1), 16. doi: 10.12962/j23546026.y2019i6.6320
- Østby, G., Urdal, H., Tadjoeiddin, M. Z., Murshed, S. M., & Strand, H. (2011). Population pressure, horizontal inequality and political violence: A disaggregated study of Indonesian Provinces, 1990–2003. *Journal of Development Studies*, 47(3), 377–398. doi: 10.1080/00220388.2010.506911

- Pasaribu, C. M. (2015). Kajian isu pemekaran di Kota Medan: Tinjauan berdasarkan kondisi ketimpangan wilayah. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 3(3), 151. doi: 10.14710/jwl.3.3.151-162
- Putri Maharani, S. H., Santoso, P., & Sukendro, A. (2022). Konflik batas wilayah daerah pemekaran Kepulauan Seribu mengancam keamanan nasional. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 40. doi: 10.24198/jkrk.v4i1.37915
- Rochmatullah, M. R., Winarna, J., & Gantowati, E. (2020). Economic growth in Indonesian new autonomous: social-economic perspective. *JEJAK*, 13(1), 170–187. doi: 10.15294/jejak.v13i1.22816
- Saideman, S. M. (1997). Explaining the international relations of secessionist conflicts: Vulnerability versus ethnic ties. *International Organization*, 51(4), 721–753. doi: 10.1162/002081897550500
- Saputra, R. (2021). Policy evaluation of regional expansion and determination regional boundaries in Banten and West Java Province. *Sosiohumaniora*, 23(3), 400. doi: 10.24198/sosiohumaniora.v23i3.34597
- Septianingrum, R. S., Aditya, B., Wijaya, A. P., Irshabdillah, M. R., Husna, N. A., & Putri, R. F. (2020). Economic inequality and its impact on human development: Insight of Banten Province 2011-2015. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 451(1), 012107. doi: 10.1088/1755-1315/451/1/012107
- Stenross, K. (2007). *The seafarers and maritime entrepreneurs of Madura*.
- Supriyadi, Fauzan, Aisyul Hana, U., & Rahman, A. (2021). Optimalisasi pariwisata syariah dalam upaya peningkatan ekonomi lokal masyarakat Madura. *GREENOMIKA*, 3(2), 56–66. doi: 10.55732/unu.gnk.2021.03.2.2
- Surjono, S. S., & Gunawan, M. (2018). Onshore-offshore facies change of Ngrayong Sandstone in Madura Area Indonesia. *ASEAN Engineering Journal*, 8(2), 1–15. doi: 10.11113/aej.v8.15499
- Udiarto, A. K. (2015). Karakteristik pengembangan wilayah sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Jayapura. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 3(2), 121. doi: 10.14710/jwl.3.2.121-130
- Wimmer, A., Cederman, L.-E., & Min, B. (2009). Ethnic politics and armed conflict: A configurational analysis of a new global data set. *American Sociological Review*, 74(2), 316–337. doi: 10.1177/000312240907400208
- Yusuf, M., Muntasa, A., Sophan, M. K., Oseni, K. O., & Agustiono, W. (2021). Geographic information system (GIS) for salt management in Madura Island. *2021 IEEE 7th Information Technology International Seminar (ITIS)*, 1–5. Surabaya, Indonesia: IEEE. doi: 10.1109/ITIS53497.2021.9791561
- (GIS) for Salt Management in Madura Island. 2021 IEEE 7th Information Technology International Seminar (ITIS), 1-5. Surabaya, Indonesia: IEEE. doi: 10.1109/ITIS53497.2021.9791561